

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba telah memainkan peranan penting dalam peta perpolitikan dunia. Sejarah mencatat, hubungan diplomatik dinatara keduanya mengalami pasang surut terutama setelah terjadinya revolusi Kuba yang ditandai dengan runtuhnya rezim Fulgencio Batista di tahun 1959. Pasca peralihan kepemimpinan Kuba, hubungan antara Washington-Havana memasuki era kegelapan terutama setelah dikeluarkannya kebijakan nasionalisasi ekonomi dan reformasi agraria yang memberikan hak legitimasi hukum untuk menyita tanah-tanah yang dimiliki perusahaan asing dalam hal ini Washington¹. Selain itu, dibawah kekuasaan Fidel Castro Kuba berada dibawah sistem komunis sosialis yang sangat kaku dan mengekang kebebasan masyarakatnya.

Sebagai respon atas tindakan Kuba tersebut, pada tahun 1960 Amerika Serikat memberlakukan embargo ekonomi terhadap Kuba, dimana Amerika Serikat

¹ *A Brief History of U.S. – Cuba Relations* dalam :
<http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1891359,00.html>, Diakses pada 19 Januari 2017

menghentikan seluruh kegiatan perdagangan dengan Kuba. Bentuk respon Amerika Serikat terhadap Kuba lainnya, yaitu hingga ancaman penggunaan kekuatan militer²

Dibawah kekuasaan presiden Fidel Castro tingkat keharmonisan hubungan Amerika Serikat-Kuba perlahan semakin memudar terutama pasca Kuba melakukan berbagai kesepakatan dengan Uni Soviet. Sikap Kuba yang semakin menantang tersebut membuat Amerika Serikat menjadi semakin geram hingga pada 3 Januari 1961 dibawah administrasi presiden Dwight Eisenhower Amerika Serikat menarik duta besarnya di Havana dan menghentikan hubungan diplomatik dengan Kuba.

Puncak dari ketegangan hubungan Amerika Serikat-Kuba terjadi pada saat berakhirnya perang dunia II, yang mana saat itu menjadikan tatanan dunia terbagi menjadi dua blok, dimana blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi demokrasi liberal, sedangkan blok timur yang diprakarsai oleh Uni Soviet dengan Marxis atau komunis³. Selama bergulirnya perebutan pengaruh diantara dua kekuatan dunia, Kuba berada dipihak Uni Soviet yang dianggap sebagai kiblat ideologi negaranya sehingga segala bentuk dukungannya dicurahkan kepada Uni Soviet.

Wujud nyata dari keberpihakan Kuba terhadap Uni Soviet ditunjukkan dengan keputusannya menerima tawaran komando Nikita Khrushshev untuk

2 Chastrey E.F., Tobing. 2014. *Implikasi Politik Akibat Embargo Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Pemerintahan Fidel Castro*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Medan: Universitas Sumatra Utara.2014, hlm. 52

3.Saputra, M. Bayu, Dewi Triwahyuni, dan Prof.Dr.J.M Papasi. 2015. *Pengaruh Idiosyncratic Raul Castro Hubungan Luar Negeri Kuba-Amerika Serikat*. Jurnal HI Unikom in Vol. 4 No. 2. Bandung: Unikom. 2015, hlm. 1

memosisikan misilnya di Kuba sebagai deteren. Hal ini merupakan reaksi Uni Soviet atas kebijakan Amerika Serikat yang memosisikan misilnya di Turki dan Italia. Beberapa saat setelah itu, porsonel intelijen Amerika Serikat berhasil melacak keberadaan misil nuklir Uni Soviet yang di letakkan di daratan Kuba. Pada bulan Oktober 1962 keadaan semakin menegang setelah presiden Kennedy mengumumkan di siaran televisi nasional bahwa selama enam hari kedepan Amerika Serikat berada dititik ambang batas perang nuklir dengan Uni Soviet⁴.

Selama masa-masa krisis tersebut, Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan perundingan untuk menghindari kontak fisik, hal ini diwujudkan dengan adanya inisiatif presiden Kennedy untuk mengupayakan jalan damai melalui diplomasi meskipun tetap siaga akan kemungkinan terjadinya konfrontasi militer. Ketegangan yang terus meningkat ini kemudian berhasil diredam melalui diplomasi antara kedua negara dengan merancang kesepakatan diantaranya presiden Kennedy mengindikasikan akan menarik kembali misil-misil yang telah dipasang di Turki⁵.

Pasca berakhirnya peristiwa krisis missil Kuba (*Cuban Missile Crisis*), ketegangan diantara Amerika Serikat – Kuba mulai menyurut khususnya antara tahun 1975 sampai 1980 bahkan terjadi beberapa kesepakatan yang difasilitasi oleh PBB. Peredaan ketegangan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan baru kepada Kuba diantaranya kebijakan presiden Jimmy Carter pada tahun 1977

4 Cuban Missile Crisis dalam : <http://www.history.com/this-day-in-history/cuban-missile-crisis>
Diakses Pada 19 Januari 2017

5 Cuban Crisi Missile 1962 dalam :
http://www.academia.edu/7254024/Krisis_Misil_Kuba_Cuban_Missile_Crisis_1962 Diakses Pada
19 Januari 2017

yang mana pemerintah Amerika Serikat menetapkan kebijakannya untuk memperbolehkan turis-turis mereka melakukan perjalanan wisata ke Kuba, selain itu juga turut disepakati kebijakan mengenai perikanan dan kelautan⁶.

Pada 20 Januari 1981 kekuasaan Jimmy Carter digantikan oleh presiden Ronald Reagan, yang mana peralihan kekuasaan tersebut berdampak terhadap hubungan Amerika Serikat – Kuba. Pada bulan April 1982 presiden Reagan kembali menetapkan kebijakan terhadap Kuba dibawah peraturan *Cuban Assets Control Regulations* (CACR) yang dikeluarkan oleh *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) diantaranya mereka memberlakukan kembali kebijakan larangan perjalanan wisata ke Kuba bagi penduduk Amerika Serikat. Baik itu penduduk asli Amerika Serikat maupun pengungsi Kuba yang menetap di Amerika Serikat dan hanya memperbolehkan melakukan perjalanan dengan alasan-alasan mendesak. Selain itu juga mereka membatasi pengiriman uang kepada keluarga mereka yang ada di Kuba⁷.

Dimasa kepemimpinan presiden Ronald Reagan, pemerintah Amerika Serikat membentuk organisasi pembela demokrasi yang dikenal dengan *National Endowment for Democracy* (NED). Pembentukan NED dianggap sebagai respon atas situasi ekonomi-politik saat itu, terutama ketika terjadi gelombang masif gerakan sosial yang menentang rezim otoriter yang dimotori oleh para penggiat aktivis HAM, mahasiswa, dan para intelektual publik setelah sekian lama terjerat dibawah kekuasaan kekuasaan

6. Mark, P., Sullivan. Cuba : *U.S Restrictions on Travel and Remittances*. Latin American; Congressional Research Service, 2016, hlm. 1

7. Mark, P., Sullivan *Ibid.*, hlm. 1

rezim otoriter⁸. Pada saat itu, Kuba menjadi salah satu sasaran dari misi NED, karena saat itu Kuba masih menerapkan sistem sosialis komunis yang sangat mengekang kebebasan bagi warga negaranya. Namun hingga masa kepemimpinan presiden Bush, Kuba belum juga enggan untuk menuju sistem yang lebih demokratis, bahkan pemerintah Amerika Serikat berkali-kali menjatuhkan sanksi untuk mengancam Kuba agar bersedia menjadi negara yang lebih terbuka. Kenyataan inilah yang selalu menjadi alasan dari meningkatkan ketegangan hubungan antara Amerika Serikat-Kuba.

Pada 13 Agustus 2006, Fidel Castro menyerahkan tampuk kekuasaan Negara Kuba yang sudah dipegang selama 40 tahun, kepada adiknya yaitu Raul Castro. Dengan membawa idealisme yang sama, Raul Castro memimpin Kuba mewarisi sistem pemerintahan sebelumnya. Pada tahun 2009 atau 3 tahun pasca penyerahan kekuasaan yang terjadi di Kuba, Amerika Serikat berusaha untuk kembali bisa bernostalgia dengan Kuba yang sudah membeku sejak 1959 atau lebih dari 6 dasawarsa. Gelapnya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Kuba, mulai menuju titik terang setelah terbukanya komunikasi kedua negara tersebut dalam sebuah pertemuan di Panama pada tahun 2009. Pertemuan tersebut melibatkan antara

⁸ Peran Amerika Serikat dalam Mempromosikan Demokrasi Seantero Dunia : Tinjauan Perspektif Idealisme-Liberalisme dalam : <https://studyinternationalrelations.wordpress.com/2012/10/27/peran-Amerika-Serikat-dalam-mempromosikan-demokrasi-seantero-dunia-berdasarkan-tinjauan-perspektif-idealisme-liberalisme>. Diakses pada 26 Februari 2017

orang nomor satu di kedua negara, yaitu Presiden Barack Obama dan Presiden Raul Castro⁹.

Terpilihnya Barack Obama sebagai pemimpin nomor satu di negeri Paman Sam, membawa perubahan bagi negara adidaya tersebut, terutama citra Amerika Serikat ditengah-tengah panggung internasional. Sejak awal masa kampanye, Presiden kulit hitam pertama dalam sejarah Amerika Serikat tersebut, mengungkapkan keinginannya untuk lebih mengedepankan *soft power* dalam arena perpolitikan. Obama berpendapat bahwa di era saat ini penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah tidak relevan, sehingga strategi *soft power* dipilih agar lebih efisien¹⁰. Presiden Barack Obama juga memiliki keinginan untuk merangkul negara-negara yang memiliki hubungan tidak harmonis dengan Amerika Serikat sebelumnya. Perubahan arah Amerika Serikat yang lebih bersahabat dengan negara-negara seterusnya mulai terlihat pengaruhnya, terutama dalam iklim hubungan Amerika Serikat dan Kuba.

Perhatian Obama terhadap Kuba bermula sejak awal menduduki kursi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2009, pada saat itu Barack Obama mengambil keputusan untuk mendukung masyarakat Kuba untuk dapat mengatur sendiri bangsanya dengan demokratis agar dapat menentukan arah masa depan Kuba sendiri. Barack Obama mulai menggeser arah pandang negara sosialis tersebut. Penulis

9. Yang, Seohyeong, et al. *President Obama in Cuba, Another Step for the Normalization of Relations: As the U.S. President Visits Havana*. Published ; Council on Hemispheric Affairs. 2016, hlm 2.

10. Alessandro, Badella. *Obama and U.S Democracy Promotion in Cuba : New Strategies, Old Goals?* . Caribbean Journal of International Relations & Diplomacy Vol. 3, No. 2. 2015., hlm.17

beranggapan bahwa melalui kepemimpinan presiden Barack Obama, Amerika Serikat memulai praktik diplomasi yang lebih baik karena tidak menjadikan perbedaan ideologi sebagai hambatan untuk melakukan hubungan diplomatik.

Keputusan Barack Obama yang mengarahkan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat 180 derajat terhadap negara-negara yang pernah dianggap sebagai “musuh” menjadi mitra strategis mampu mengubah cara pandang masyarakat internasional terhadap negara Paman Sam. Respon positif yang diberikan dunia internasional terhadap perubahan arah kebijakan pemerintah Amerika Serikat dibawah kekuasaan Obama dianggap sebagai sebuah metode bersosialisasi dalam politik luar negeri yang berbeda dan belum pernah ditempuh oleh pemerintahan sebelumnya terutama penyesuaian kebijakan Amerika Serikat yang bertumpu pada keadaan sosial yang sedang terjadi di lingkungan eksternalnya.

Sejak kepemimpinan Kuba oleh Fidel Castro hingga Raul Castro, Amerika Serikat sudah 10 kali berganti kepemimpinan, selama itulah kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap Kuba tidak berubah. Pada Desember 2014, Gedung Putih mencatatkan sejarah penting dengan mulai membuka komunikasi dengan Negara Kuba dalam rangka melakukan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara atau “*new course on Cuba*”¹¹. Komunikasi tersebut menjadi awal dari lembaran baru hubungan diplomatik kedua negara. Pada 8 Maret 2015, pemerintah Kuba melalui Presiden Raul Castro, memberikan pernyataan resmi kenegaraan perihal komunikasi yang terjadi sebelumnya antara pemerintah Kuba dan Gedung Putih. Pernyataan Raul

11. Yang, Seohyeong. *Ibid*, hlm. 1

Castro terkait rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat ke Kuba dalam agenda normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.

Pada tahun 2009 lalu atau tepatnya sebelum dilakukannya normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat-Kuba, presiden Barack Obama telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dan telekomunikasi yang merupakan rangkaian dari kebijakan *Reaching Out Cuban People* dengan dikeluarkannya kebijakan baru mendorong terjalinnya interaksi yang lebih intens diantara kedua negara yang telah lama membeku.

Pada 21 Maret 2016, Barack Obama dan keluarganya resmi melakukan kunjungan kenegaraan ke negara pimpinan Raul Castro tersebut. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kenegaraan pertama kali setelah lebih dari 50 tahun dan kunjungan pertama Presiden bersama *First Lady* ke negara Kuba setelah hampir 90 tahun. Kunjungan penting tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Raul Castro untuk meminta Kongres Amerika Serikat agar bersedia mengurangi sanksi embargo terhadap Kuba¹².

Fenomena perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang lebih bersahabat terhadap Kuba menjadi bahan penulis untuk melakukan analisis terutama karena fenomena politik tersebut telah menyorot perhatian dunia internasional sehingga sangat menarik untuk dianalisa. Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka penulis mengusung judul **Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika**

12.Foreign Policy Cuba dalam : <https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/cuba>. Diakses Pada 8 April 2016.

Serikat-Kuba di Era Presiden Barack Obama 2009-2016 : (Analisa Konstruktivis).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Mengapa Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba di era presiden Barack Obama ?
2. Bagaimana Amerika Serikat melakukan proses Konstruksi Sosial terhadap Kuba ?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam menjawab serta menganalisa pokok permasalahan yang ada maka penulis akan menggunakan Teori Konstruktivis menurut Martha Finnemore dan Model *Norm Life Cycle* menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink.

1. Teori Konstruktivis

Kemunculan Teori Konstruktivis dianggap sebagai bentuk kritik terhadap teori realis dan liberal yang dianggap terlalu kaku mengilmiahkan interaksi dalam hubungan internasional tanpa memperhitungkan faktor-faktor seperti nilai dan

norma¹³. Konstruktivis memandang bahwa nilai dan norma yang ada dan berkembang dalam lingkungan internasional dapat mempengaruhi tindakan suatu negara. Perubahan dimungkinkan karena realitas dikonstruksikan secara sosial yang mana dipengaruhi oleh ide dan norma karena pemikiran kunci dari Konstruktivis adalah bahwa dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia¹⁴.

Konstruktivis memiliki kepentingan untuk menggunakan norma sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan sosial. Hal ini merupakan sisi “kritis” dari konstruktivis. Konstruktivis menolak seperti fokus pada materi sepihak. Tokoh-tokoh Konstruktivis berpendapat bahwa aspek yang paling penting dari hubungan internasional adalah sosial, bukan aspek material. Suatu negara bersedia memenuhi norma internasional karena mereka menginginkan untuk dapat meningkatkan identitas dan reputasi mereka sebagai negara modern¹⁵. Salah satu teoritis Konstruktivis adalah Martha Finnmore. Sebagai seorang teoritis Konstruktivis, Finnmore memberikan kontribusi pemikiran yang besar mengenai analisa fenomena hubungan Internasional.

¹³ Summary Teori Hubungan Internasional 2 dalam :
http://www.academia.edu/12125831/Summary_Teori_Hubungan_Internasional_2, Diakses pada 18 Maret 2017

¹⁴ Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Cetakan ke-II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009, hlm. 307

¹⁵ Ningrum, A. Kusuma. *Respon Australia Terhadap Indonesia Terkait Kasus Eksekusi Mati Duo Bali Nine Tahun 2005-2015*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Yogyakarta : UMY.2016, hlm 6.

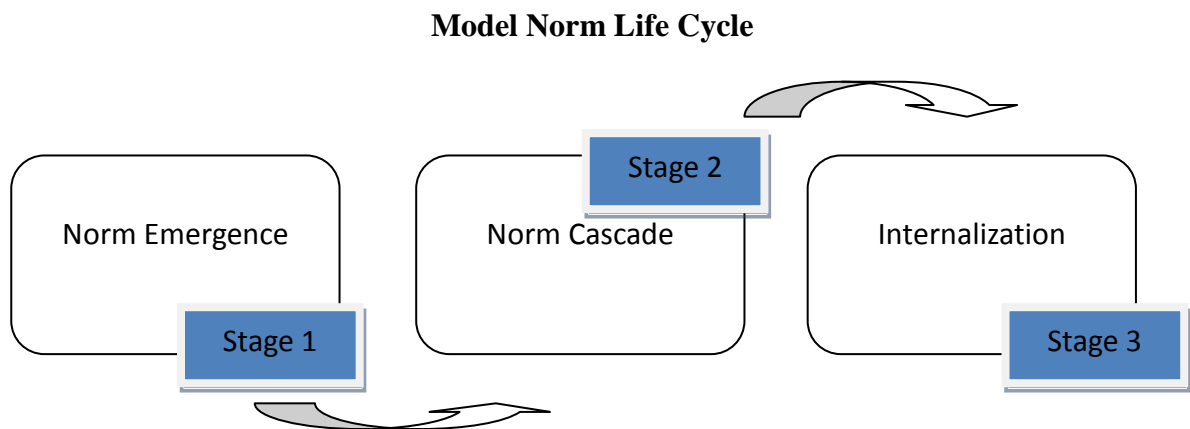
Berikut teori Konstruktivis menurut Martha Finnemore :

“State interest are constituted by ideas and norms” (Finnemore, 1996)

Asumsi Finnemore diatas secara jelas menekankan pentingnya pengaruh ide dan norma dalam menentukan sikap suatu negara dalam menghadapi realitas sosial yang sedang terjadi termasuk dalam konteks politik internasional. Teori Konstruktivis menganggap bahwa kepentingan dari suatu negara akan terbentuk melalui ide dan norma.

3. Model *Norm Life Cycle*.

Gambar 1.1



Berdasarkan Model *Norm Life Cycle* diatas, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menggambarkan bagaimana proses kemuculan norma melalui tiga tahapan diantaranya *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Internalization*. Setiap proses memiliki peranan masing-masing dalam mewujudkan lahirnya suatu norma hingga

dapat berkembang dalam skala internasional. Untuk dapat memahami lebih *detail* mengenai proses *Norm Life Cycle* Penulis akan menyajikan tabel yang berisikan langkah-langkah dalam memunculkan, menyebarkan hingga norma tersebut dapat mengakar dalam suatu negara.

Berikut penjelasan yang dapat digunakan dalam menganalisa kemunculan hingga penyebaran suatu norma dengan menggunakan Model *Norm Life Cycle* menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998).

Tabel 1.1

Stage of norms

	<i>Stage 1 : Norms emergence</i>	<i>Stage 2 : Norm cascade</i>	<i>Stage 3 : Norm Internalization</i>
<i>Actors</i>	Norm entrepreneurs with organizational platforms	State, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
<i>Motives</i>	Altruism, empathy, ideational commitment	Legitimacy, reputation, esteem	conformity
<i>Dominant Mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Sumber : Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. 1998. International Norm Dynamics and Political Change. International Organization 52, 4, Autumn 1998. Hlm. 896.

Berdasarkan tabel diatas, tahapan pertama terdiri dari *Norm Emergence*, pada tahapan ini dianggap sebagai awal munculnya norma. Norma tidak muncul dengan sendirinya namun terdapat agen yang menginisiasi norma tersebut. Agen yang menginisiasi norma itulah yang disebut sebagai *Norm entrepreneurs*¹⁶. *Norm entrepreneurs* yang melakukan pengkajian terhadap keberadaan suatu isu kemudian menginterpretasikan isu tersebut sehingga memunculkan terciptanya alternatif norma dalam memandang apa yang dianggap layak sebagai respon atas isu yang muncul tersebut. Proses reinterpretasi inilah yang disebut sebagai *framing*. Kemudian untuk dapat mengangkat norma tersebut kedalam tahapan internasional aktor membutuhkan wadah seperti organisasi-organisasi NGO yang mana disebut sebagai *organizational platform*¹⁷. Melalui *organizational platform* maka norma dapat diangkat hingga skala internasional. Kemudian sebelum norma pada tahapan kedua, norma akan memasuki titik kritis. Finnemore dan Sikkink menggambarkan bahwa titik kritis yang dimaksudkan adalah apakah norma tersebut dapat diterima oleh sebagian besar negara atau ditolak, dalam tahapan ini dibutuhkan peranan besar dari *norm entrepreneurs*. Bagaimana *norms entrepreneur* mampu mempersuasi masyarakat internasional agar bersedia menerapkan norma tersebut.

¹⁶ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *International Norm Dynamic and Political Change* : International Organization, Vol.52, No. 4 (Autum). 1998., hlm 896.

¹⁷ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *Ibid.*, hlm. 899.

Selanjutnya tahapan kedua disebut sebagai *norm cascade*, pada tahapan ini norma telah memasuki fase penerimaan dari masyarakat internasional. Dalam konteks negara, maka negara tersebut akan menciptakan institusionalisasi untuk memperkuat keberadaan norma tersebut. Dengan diterimanya norma dalam konteks domestik maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi untuk menyebarkan norma agar keberadaan norma lebih meluas dalam suatu negara. Sarana yang digunakan berupa mekanisme sosialisasi yang aktif antara norm enterpreuner, organisasi internasional bahkan organanisasi lokal¹⁸. Sehingga dapat dikatakan bahwa *network* dengan organisasi lokal dianggap sebagai pendukung dari dalam negara itu sendiri. Hal yang rasional digunakan bahwa, dengan mengadopsi dan menyebarkan norma internasional maka mereka dapat meningkatkan legitimasi negaranya.

Tahapan ketiga atau tahapan terakhir yaitu *internalization*, pada tahapan ini norma sudah diterima secara menyeluruh bahkan dianggap sebagai standar dari perilaku masyarakatnya sehingga setiap individu harus menaati norma tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan dalam realitas sosial mereka¹⁹.

Setelah menelaah Teori Konstruktivis Martha Finnemore dan Model *Norm Life Cycle* menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink kemudian di implementasikan kedalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis maka dapat

¹⁸Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *Ibid.*, hlm. 902.

¹⁹Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *Ibid.*, hlm. 904.

dijabarkan bahwa Amerika Serikat yang merupakan negara promotor demokrasi yang dalam hal ini dianggap sebagai *norm entrepreneurs* karena merupakan aktor yang bertanggung jawab untuk menginisiasi serta menyebarkan ide dan norma demokrasi yang dianutnya terhadap seluruh negara di dunia tidak terkecuali negara yang masih terhimpit oleh permasalahan sosial seperti Kuba. Kuba yang dikenal sebagai negara komunis dengan isu-isu pengekangan kebebasan bahkan pelanggaran HAM dalam negaranya mendorong Amerika Serikat sebagai *norms entrepreneurs* untuk terus konsisten dalam mewujudkan perubahan sosial di Kuba.

Melalui kebijakan normalisasi hubungan diplomatik dianggap sebagai *treatment* terbaik untuk mewujudkan keinginan Amerika Serikat yaitu mengubah Kuba agar menjadi negara yang lebih demokratis dan bersedia menerapkan norma-norma demokrasi sesuai dengan norma yang dianut oleh Amerika Serikat. Demi konsisten untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai negara promotor demokrasi, Amerika Serikat membentuk *organizational platform* sebagai wadah untuk menyebarkan norma-norma demokrasi, adapun *organization platform* yang dimaksud seperti *National Democratic Institute* (NDI), *International Republican Institute* (IRI), *National Endowment for Democracy* (NED). Organisasi-organisasi tersebut diberi mandat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demokrasi demi terwujudnya perubahan sosial termasuk di Kuba.

Dibawah kekuasaan presiden Barack Obama mekanisme promosi demokrasi di Kuba akan dilakukan dengan strategi yang berbeda. Promosi demokrasi era Barack Obama cenderung menerapkan gaya *soft power* untuk merangkul Kuba agar bersedia menjadi negara yang lebih demokratis²⁰. Pendekatan dan strategi yang lebih bersahabat diharapkan lebih efektif untuk mensosialisasikan ide dan norma demokrasi di Kuba.

Perubahan sikap Amerika Serikat yang cenderung menggunakan strategi yang lebih bersahabat bertumpu pada harapan akan terwujudnya perubahan sosial karena instrumen yang digunakan adalah Konstruksi Sosial, Konstruksi Sosial dianggap sebagai upaya untuk menyebarkan ide dan norma demokrasi melalui sarana sosialisasi yang nantinya akan dilakukan oleh Amerika Serikat beserta organisasi-organisasi internasional dan organisasi lokal yang ada di Kuba. Rasionalnya organisasi-organisasi lokal bersedia melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional karena mereka ingin meningkatkan legitimasi negaranya.

Melalui proses Konstruksi Sosial diharapkan dapat membangun (mengkonstruksi) pemahaman Kuba agar bersedia menjadi negara yang lebih terbuka, serta bersedia untuk menerapkan norma-norma demokrasi. Karena dengan keberhasilan Konstruksi Sosial maka ide dan norma yang telah di “transfer” melalui mekanisme sosialisasi dapat menumbuhkan pandangan yang baru bagi Kuba. Dengan tumbuhnya pandangan yang semakin mirip dengan Amerika Serikat maka

²⁰ Alessandro, Badella..*Ibid.*, hlm 17

akan membawa pengaruh terhadap menurunnya derajat ancaman Kuba yang selama ini menjadi kekhawatiran Amerika Serikat.

Mengingat bahwa antara Amerika Serikat dan Kuba selalu terlibat peristiwa ketegangan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan (ideologi). Sehingga dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba karena berkepentingan untuk menurunkan derajat ancaman Kuba melalui sarana penyebaran ide dan norma demokrasi terhadap negara sosialis tersebut dengan tujuan untuk memiripkan pandangan kedua negara. Hal ini telah sesuai dengan teori Konstruktivis menurut Martha Finnemore yang mengatakan bahwa kepentingan negara didasari oleh ide dan norma.

Lebih lanjut, dalam penelitian ini Penulis akan menjelaskan proses perubahan kondisi dalam hubungan Amerika Serikat-Kuba yang terjadi diantara keduanya dengan menggunakan analisa teori Konstruktivis dan Model *Norm Life Cycle*.

D. Hipotesa Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dan penjelasan kerangka pemikiran diatas maka Penulis menarik kesimpulan sementara bahwa Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba di era Presiden Barack Obama karena:

1. Amerika Serikat ingin menurunkan derajat ancaman Kuba melalui Konstruksi Sosial.
2. Amerika Serikat melakukan Konstruksi Sosial dengan cara mensosialisasikan norma demokrasi terhadap Kuba.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan dan sebab mengapa Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba di era presiden Barack Obama.
2. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kepentingan suatu negara dalam memperbaiki hubungan diplomatiknya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas proposal skripsi bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti buku-buku, jurnal, dan media massa seperti surat kabar dan situs internet yang memuat data yang sesuai dengan penulisan ini.

G. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Fokus utama dari penulisan ini adalah membahas sebab-sebab yang mempengaruhi perubahan

kebijakan Amerika Serikat terhadap Kuba di era presiden Barack Obama. Namun tidak menutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan diluar batasan tersebut. Seperti menengok kembali sejarah hubungan diplomatik diantara Amerika Serikat-Kuba untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, dengan catatan memperhatikan relevansinya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangkapemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang berisi garis besar penelitian skripsi.

Bab II : Memaparkan dinamika hubungan Amerika Serikat dengan Kuba sebelum kepemimpinan presiden Barack Obama.

Bab III: Memaparkan upaya Amerika Serikat dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba di era presiden Barack Obama.

Bab IV: Normalisasi Sebagai Upaya Menurunkan Derajat Ancaman Melalui Konstruksi Sosial.

Bab V : Kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini.

